



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H.,M.H.**
Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. HARLI SIREGAR, S.H.,M.Hum.**
Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Belawan, 12 Januari 2026,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
SUMATERA UTARA,

Dr. HARLI SIREGAR, S.H.,M.Hum.


KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BELAWAN,

Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H.,M.H.

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN
TAHUN 2026**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	73
2	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengendalian perkara	91%
		Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	84%
3	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal	80%
4	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Indeks reformasi birokrasi	84
		Tingkat penerapan etika profesi jaksa	80%

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 414.350.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp 16.144.668.000
	Jumlah	Rp 16.559.018.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Layanan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Belawan, 12 Januari 2026,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
SUMATERA UTARA,

Dr. HARLI SIREGAR, S.H., M.Hum

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BELAWAN,

Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H., M.H.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **YOGI FRANSIS TAUFIK, S.H.,M.H.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H.,M.H.**
Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Belawan, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BELAWAN,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,


Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H.,M.H.


YOGI FRANSIS TAUFIK, S.H.,M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga pra penuntutan	81%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan	81%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap) dan telah dieksekusi	89%
2	Meningkatnya penegakan hukum yang yang adil, humanis, proporsional, dan efisien	Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai	67%
3	Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan	Tingkat kualitas penanganan perkara yang terekam dalam Case Management System	86%
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum	4,1
5	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pra Penuntutan	Rp 1.200.000
2	Penuntutan	Rp 203.325.000
3	Restorative Justice	Rp 2.770.000
4	Eksekusi	Rp 5.880.000
Jumlah		Rp 213.175.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Belawan, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BELAWAN,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,


Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H., M.H.


YOGI FRANSIS TAUFIK, S.H., M.H.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ANDRI RICO MANURUNG, S.H.,M.H.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H.,M.H.**
Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Belawan, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BELAWAN,**

Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H.,M.H.

Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,**

ANDRI RICO MANURUNG, S.H.,M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penegakan hukum yang adil, humanis, proporsional, dan efisien	Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai	67%
2	Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	78%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	perpajakan, tindak pidana kepabeanaan, tindak pidana cukai, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel dan profesional	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	85%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanaan dan TPPU	85%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU	85%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU	52%
		Tingkat keberhasilan pengendalian operasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus	76%
3	Meningkatnya keberhasilan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana khusus	Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	28%
		Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanaan, Perpajakan, Cukai, tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara)	36%
4	Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan	Tingkat kualitas penanganan perkara yang terekam dalam <i>Case Management System</i>	86%
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum	4,1
6	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelidikan	Rp 6.003.000
2	Penyidikan	Rp 20.005.000
3	Pra Penuntutan dan Penuntutan	Rp 8.650.000

4	Eksekusi Pidrus	Rp 365.000
Jumlah		Rp 35.023.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Belawan, 12 Januari 2026


Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BELAWAN,


Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H.,M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS.


ANDRI RICO MANURUNG, S.H.,M.H.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DANIEL SETIAWAN BARUS, S.H.,M.H.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI INTELIJEN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H.,M.H.**
Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Belawan, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BELAWAN,


Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H.,M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,


DANIEL SETIAWAN BARUS, S.H.,M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pemahaman Hukum Masyarakat yang Memuaskan Kepentingan Pemangku	Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat atas Materi Sosialisasi Hukum	84%
		Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Layanan Lukumpenkum	3.7

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan	Tingkat efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan	86%
3	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan Negeri Belawan	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Kampanye Anti Korupsi	Rp 1.877.000
2	Operasi Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	Rp 5.543.000
3	Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan	Rp 944.000
4	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	Rp 2.706.000
5	Layanan Penerangan Hukum	Rp 1.842.000
6	Layanan Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dan Jaksa Menyapa	Rp29.648.000
Jumlah		Rp 42.560.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Layanan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Belawan, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BELAWAN,

Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H.,M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,

DANIEL SETIAWAN BARUS, S.H.,M.H.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan	Tingkat efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan	86%
3	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan Negeri Belawan	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Kampanye Anti Korupsi	Rp 1.877.000
2	Operasi Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	Rp 5.543.000
3	Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan	Rp 944.000
4	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	Rp 2.706.000
5	Layanan Penerangan Hukum	Rp 1.842.000
6	Layanan Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dan Jaksa Menyapa	Rp 29.648.000
Jumlah		Rp 42.560.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Layanan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Belawan, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BELAWAN,


Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H.,M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,


DANIEL SETIAWAN BARUS, S.H.,M.H.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **BAYU ESHA WIRANA, S.H.,M.H.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H.,M.H.**
Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Belawan, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BELAWAN,**


Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H.,M.H.

Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA,**


BAYU ESHA WIRANA, S.H.,M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Advocaat Generaal dan Jaksa Pengacara Negara	Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer	95%
2	Meningkatnya efektivitas pelayanan hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi	Indeks Persepsi atas pelayanan hukum	3,7

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	Jaksa Pengacara Negara		
3	Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata	Tingkat keberhasilan penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata	81%
		Tingkat keberhasilan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata	81%
4	Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara transparan, akuntabel, dan profesional	Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi	81%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi	81%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi	81%
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang hukum	Indeks kepuasan layanan Publik bidang hukum (Layanan hukum gratis, konsultasi hukum, bantuan hukum, pendampingan hukum, dan penyuluhan hukum)	4,1
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum	4,1
7	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan Negeri Belawan	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Halo JPN	Rp 1.263.000
2	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	Rp 1.350.000
3	Perkara Datun	Rp 5.530.000
4	Pertimbangan Hukum/Pendampingan/Bantuan Hukum	Rp 449.000
Jumlah		Rp 8.592.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Belawan, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BELAWAN,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA,


Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H.,M.H.


BAYU ESHA WIRANA, S.H.,M.H.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SINDU HUTOMO, S.H.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H.,M.H.**
Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Belawan, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BELAWAN,**


Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H.,M.H.

Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN
PENGELOLAAN BB,**


SINDU HUTOMO, S.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI
KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya pemulihan aset yang terintegrasi	Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset	91%
		Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana	91%
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana	91%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
2	Terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang transparan, akuntabel, dan modern	Tingkat efektivitas pengelolaan Rupbasan	4,1
		Tingkat efektivitas penyelesaian penyelamatan aset negara	4,1
		Tingkat efektivitas pengelolaan data aset negara berbasis teknologi	4,1

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/Rampasan	Rp 115.000.000
	Jumlah	Rp 115.000.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Belawan, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BELAWAN,

Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H.,M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN
PENGELOLAAN BB,

SINDU HUTOMO, S.H.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MARHIRAS SIGALINGGING, S.H.**
Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H.,M.H.**
Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Belawan, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BELAWAN,


Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H.,M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,


MARHIRAS SIGALINGGING, S.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromanitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI	Nilai SAKIP Kejaksaan Negeri Belawan	85
2	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Kejaksaan RI	Nilai Kinerja Anggaran Kejaksaan Negeri Belawan	87
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan RI	Tingkat kepatuhan satuan kerja terhadap standar operasional prosedur	88%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya kualitas layanan internal dukungan manajemen dan kesehatan yustisial	Indeks kepuasan layanan dukungan internal manajemen Kejaksaan Negeri Belawan	3,7
5	Meningkatnya kompetensi Aparatur Kejaksaan RI	Persentase aparatur yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai jabatan	65%
6	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri Belawan	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan	Rp 10.948.482.000
2	Operasional dan Pemeliharaan	Rp 1.697.094.000
3	Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana	Rp 3.499.092.000
Jumlah		Rp 16.144.668.000

D. PRIORITAS NASIONAL



E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Belawan, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BELAWAN,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,


Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H.,M.H.


MARHIRAS SIGALINGGING, S.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **BAMBANG ARIADI SYAHPUTRA, S.H.**
Jabatan : **KEPALA URUSAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MARHIRAS SIGALINGGING, S.H.**
Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Belawan, 15 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN,

MARHIRAS SIGALINGGING, S.H.

Pihak Pertama,

KEPALA URUSAN TATA USAHA,
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK,

BAMBANG ARIADI SYAHPUTRA, S.H.

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA URUSAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN
KEUANGAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur..

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI	Nilai SAKIP Kejaksanaan Negeri Belawan	85
2	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Kejaksaan RI	Nilai Kinerja Anggaran Kejaksanaan Negeri Belawan	87
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan RI	Tingkat kepatuhan satuan kerja terhadap standar operasional prosedur	88%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya kualitas layanan internal dukungan manajemen dan kesehatan yustisial	Indeks kepuasan layanan dukungan internal manajemen Kejaksaan Negeri Belawan	3,7
5	Meningkatnya kompetensi Aparatur Kejaksaan RI	Persentase aparatur yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai jabatan	65%
6	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri Belawan	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan	Rp 10.948.482.000
2	Operasional dan Pemeliharaan	Rp 1.697.094.000
3	Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana	Rp 3.499.092.000
Jumlah		Rp 16.144.668.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Belawan, 15 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN,



MARHIRAS SIGALINGGING, S.H.

Pihak Pertama,

KEPALA URUSAN TATA USAHA,
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK,



BAMBANG ARIADI SYAHPUTRA, S.H.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RIZKY CHAIRUNISYA RAMADHANI, S.H.,M.H.**

Jabatan : **KEPALA SUBSEKSI I PADA SEKSI INTELIJEN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DANIEL SETIAWAN BARUS, S.H.,M.H.**

Jabatan : **KEPALA SEKSI INTELIJEN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,

DANIEL SETIAWAN BARUS, S.H.,M.H

Pihak Pertama,

**KEPALA SUBSEKSI I PADA SEKSI
INTELIJEN,**

RIZKY CHAIRUNISYA RAMADHANI, S.H.,M.H.

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBSEKSI I PADA SEKSI INTELIJEN
TAHUN 2026**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur..

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pemahaman Hukum Masyarakat yang Memuaskan Kepentingan Pemangku	Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat atas Materi Sosialisasi Hukum	84%
		Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Layanan Lukumpenkum	3.7
2	Meningkatnya efektivitas intelijen penegakan hukum	Tingkat efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan	86%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	Kejaksaan		
3	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan Negeri Belawan	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Kampanye Anti Korupsi	Rp 1.877.000
2	Operasi Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	Rp 5.543.000
3	Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan	Rp 944.000
4	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	Rp 2.706.000
5	Layanan Penerangan Hukum	Rp 1.842.000
6	Layanan Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dan Jaksa Menyapa	Rp29.648.000
	Jumlah	Rp 42.560.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Jakarta, 15 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,



DANIEL SETIAWAN BARUS, S.H.,M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI I PADA SEKSI INTELIJEN,



RIZKY CHAIRUNISYA RAMADHANI, S.H.,M.H.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **GAMALIEL GINTING, S.H.**
Jabatan : **KEPALA SUBSEKSI II PADA SEKSI INTELIJEN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DANIEL SETIAWAN BARUS, S.H.,M.H.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI INTELIJEN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Belawan, 15 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,

DANIEL SETIAWAN BARUS, S.H.,M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI II PADA
SEKSI INTELIJEN,

GAMALIEL GINTING, S.H

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBSEKSI II PADA SEKSI INTELIJEN
TAHUN 2026**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur..

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pemahaman Hukum Masyarakat yang Memuaskan Pemangku Kepentingan	Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat atas Materi Sosialisasi Hukum	84%
		Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Layanan Lukumpenkum	3.7
2	Meningkatnya efektivitas intelijen penegakan hukum	Tingkat efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan	86%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	Kejaksaan		
3	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan Negeri Belawan	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Kampanye Anti Korupsi	Rp 1.877.000
2	Operasi Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	Rp 5.543.000
3	Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan	Rp 944.000
4	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	Rp 2.706.000
5	Layanan Penerangan Hukum	Rp 1.842.000
6	Layanan Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dan Jaksa Menyapa	Rp29.648.000
	Jumlah	Rp 42.560.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Belawan, 15 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,



DANIEL SETIAWAN BARUS, S.H.,M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI II PADA
SEKSI INTELIJEN,



GAMALIEL GINTING, S.H



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **BASTIAN SIHOMBING, S.H., M.H.**
Jabatan : **KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN PADA SEKSI TINDAK
PIDANA UMUM**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YOGI FRANSIS TAUFIK. S.H.,M.H.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Belawan, 15 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI TINDAK PDANA UMUM,

YOGI FRANSIS TAUFIK, S.H.,M.H.

Pihak Pertama,

**KEPALA SUBSEKSI
PRAPENUNTUTAN PADA SEKSI
TINDAK PIDANA UMUM,**

BASTIAN SIHOMBING, S.H.,M.H.

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN PADA SEKSI
TINDAK PIDANA UMUM**

TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur..

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga pra penuntutan	81%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan	81%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap) dan telah dieksekusi	89%
2	Meningkatnya penegakan hukum yang adil, humanis, proporsional, dan efisien	Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai	67%
3	Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan	Tingkat kualitas penanganan perkara yang terekam dalam Case Management System	86%
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum	4,1
5	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pra Penuntutan	Rp 1.200.000
2	Penuntutan	Rp 203.325.000
3	Restorative Justice	Rp 2.770.000
4	Eksekusi	Rp 5.880.000
	Jumlah	Rp 213.175.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Belawan, 15 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,

KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,

YOGI FRANSIS TAUFIK, S.H.,M.H.

BASTIAN SIHOMBING, S.H.,M.H.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DANIEL SURYA PARTOGI, S.H.**
Jabatan : **KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, SUBSEKSI EKSEKUSI
DAN EKSAMINASI**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YOGI FRANSIS TAUFIK. S.H.,M.H.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Belawan, 15 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,

YOGI FRANSIS TAUFIK, S.H.,M.H.

Pihak Pertama,

**KEPALA SUBSEKSI
PENUNTUTAN, SUBSEKSI
EKSEKUSI DAN EKSAMINASI,**

DANIEL SURYA PARTOGI, S.H.

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, SUBSEKSI
EKSEKUSI DAN EKSAMINASI**

TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur..

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga pra penuntutan	81%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan	81%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap) dan telah dieksekusi	89%
2	Meningkatnya penegakan hukum yang adil, humanis, proporsional, dan efisien	Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai	67%
3	Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan	Tingkat kualitas penanganan perkara yang terekam dalam Case Management System	86%
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum	4,1
5	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pra Penuntutan	Rp 1.200.000
2	Penuntutan	Rp 203.325.000
3	Restorative Justice	Rp 2.770.000
4	Eksekusi	Rp 5.880.000
	Jumlah	Rp 213.175.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Belawan, 15 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,

KEPALA SUBSEKSI
PENUNTUTAN, SUBSEKSI
EKSEKUSI DAN EKSAMINASI,

YOGI FRANSIS TAUFIK, S.H.,M.H.

DANIEL SURYA PARTOGI, S.H.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **WILLIAM FREDERICK SOALON, S.H**
Jabatan : **KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
PADA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BAYU ESHA WIRANA, S.H.,M.H.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Belawan, 15 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA,**

**KEPALA SUBSEKSI PERDATA
DAN TATA USAHA NEGARA
PADA SEKSI PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA**

BAYU ESHA WIRANA, S.H.,M.H.

WILLIAM FREDERICK SOALON, S.H

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBSEKSI PERDATA
DAN TATA USAHA NEGARA PADA SEKSI PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA**

TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur..

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Advocaat Generaal dan Jaksa Pengacara Negara	Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer	95%
2	Meningkatnya efektivitas pelayanan hukum dalam	Indeks Persepsi atas pelayanan hukum	3,7

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	rangka pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara		
3	Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata	Tingkat keberhasilan penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata	81%
		Tingkat keberhasilan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata	81%
4	Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara transparan, akuntabel, dan profesional	Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi	81%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi	81%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi	81%
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang hukum	Indeks kepuasan layanan Publik bidang hukum (Layanan hukum gratis, konsultasi hukum, bantuan hukum, pendampingan hukum, dan penyuluhan hukum)	4,1
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum	4,1
7	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan Negeri Belawan	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Halo JPN	Rp 1.263.000
2	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	Rp 1.350.000
3	Perkara Datun	Rp 5.530.000
4	Pertimbangan Hukum/Pendampingan/Bantuan Hukum	Rp 449.000
Jumlah		Rp 8.592.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Belawan, 15 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA,



BAYU ESHA WIRANA, S.H.,M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PERDATA
DAN TATA USAHA NEGARA
PADA SEKSI PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA



WILLIAM FREDERICK SOALOON, S.H



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ROMANNA DEBORA MEILIANI MARPAUNG, S.H.,M.H.**
Jabatan : **KEPALA SUB SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BAYU ESHA WIRANA, S.H.,M.H.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Belawan, 15 Januari 2026

Pihak Kedua,

**KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA,**

BAYU ESHA WIRANA, S.H.,M.H.

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB SEKSI
PERTIMBANGAN HUKUM,**

ROMANNA DEBORA, S.H.,M.H.

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM
TAHUN 2026**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur..

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Advocaat Generaal dan Jaksa Pengacara Negara	Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer	95%
2	Meningkatnya efektivitas pelayanan hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara	Indeks Persepsi atas pelayanan hukum	3,7
3	Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pemulihan	Tingkat keberhasilan penyelamatan keuangan negara melalui jalur	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	keuangan negara melalui jalur perdata	perdata	81%
		Tingkat keberhasilan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata	81%
4	Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara transparan, akuntabel, dan profesional	Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi	81%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi	81%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi	81%
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang hukum	Indeks kepuasan layanan Publik bidang hukum (Layanan hukum gratis, konsultasi hukum, bantuan hukum, pendampingan hukum, dan penyuluhan hukum)	4,1
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum	4,1
7	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan Negeri Belawan	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Halo JPN	Rp 1.263.000
2	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	Rp 1.350.000
3	Perkara Datun	Rp 5.530.000
4	Pertimbangan Hukum/Pendampingan/Bantuan Hukum	Rp 449.000
	Jumlah	Rp 8.592.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Belawan, 15 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA,



BAYU ESHA WIRANA, S.H.,M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SUB SEKSI
PERTIMBANGAN HUKUM,



ROMANNA DEBORA, S.H.,M.H.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **FRISILLIA BELLA, S.H.**
Jabatan : **KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM LUAR BIASA DAN EKSEKUSI PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDRI RICO MANURUNG, S.H.,M.H**
Jabatan : **KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Belawan, 15 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS,

KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN,
UPAYA HUKUM LUAR BIASA, DAN
EKSEKUSI PADA SEKSI TINDAK
PIDANA KHUSUS


ANDRI RICO MANURUNG, S.H.,M.H

FRISILLIA BELLA, S.H.

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM
LUAR BIASA, DAN EKSEKUSI PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS**

TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur..

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penegakan hukum yang adil, humanis, proporsional, dan efisien	Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai	67%
2	Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	78%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	perpajakan, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana cukai, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel dan profesional	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	85%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU	85%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU	85%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU	52%
		Tingkat keberhasilan pengendalian operasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus	76%
3	Meningkatnya keberhasilan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana khusus	Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	28%
		Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan, Perpajakan, Cukai, tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara)	36%
4	Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan	Tingkat kualitas penanganan perkara yang terekam dalam <i>Case Management System</i>	86%
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum	4,1
6	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelidikan	Rp 6.003.000
2	Penyidikan	Rp 20.005.000
3	Pra Penuntutan dan Penuntutan	Rp 8.650.000
4	Eksekusi Pidsus	Rp 365.000

Jumlah	Rp 35.023.000
--------	---------------

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Belawan, 15 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS,

KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN,
UPAYA HUKUM LUAR BIASA, DAN
EKSEKUSI PADA SEKSI TINDAK
PIDANA KHUSUS,



ANDRI RICO MANURUNG, S.H.,M.H

FRISILLIA BELLA, S.H.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DEYPEND TOMMY SIBUEA, S.H.**
Jabatan : **KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKANDAN PENGENDALIAN
OPERASI PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDRI RICO MANURUNG, S.H.,M.H.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Belawan, 15 Januari 2026

Pihak Kedua,

**KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,**

ANDRI RICO MANURUNG, S.H.,M.H

Pihak Pertama,

**KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN
DAN PENGENDALIAN OPERASI
PADASEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,**

DEYPEND TOMMY SIBUEA, S.H.

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN DAN
PENGENDALIAN OPERASI PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS**

TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur..

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penegakan hukum yang adil, humanis, proporsional, dan efisien	Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai	67%
2	Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	78%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	perpajakan, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana cukai, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel dan profesional	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	85%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU	85%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU	85%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU	52%
		Tingkat keberhasilan pengendalian operasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus	76%
3	Meningkatnya keberhasilan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana khusus	Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	28%
		Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan, Perpajakan, Cukai, tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara)	36%
4	Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan	Tingkat kualitas penanganan perkara yang terekam dalam <i>Case Management System</i>	86%
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum	4,1
6	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelidikan	Rp 6.003.000
2	Penyidikan	Rp 20.005.000
3	Pra Penuntutan dan Penuntutan	Rp 8.650.000
4	Eksekusi Pidsus	Rp 365.000

Jumlah	Rp 35. 023.000
--------	----------------

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Belawan, 15 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,



ANDRI RICO MANURUNG, S.H.,M.H

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN
DAN PENGENDALIAN OPERASI
PADASEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,



DEYPEND TOMMY SIBUEA, S.H.